



LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN -
**FINANCIAL CONGLOMERATES - INTEGRATED GOOD
CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ANNUAL
REPORT**

HSBC INDONESIA 2017

HSBC INDONESIA FINANCIAL CONGLOMERATES

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bank HSBC Indonesia Internasional (selanjutnya disebut "Bank HSBC") selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
4. SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia Tahun 2015, terdiri dari:

- Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan

The implementation of Integrated Governance Financial Conglomerates in HSBC always based on the following basic principles:

1. Transparency is disclosing material and relevant information as well as transparency in the decision making process.
2. Accountability is clarity of function and the implementation of function accountability in the financial conglomerate to enable effective management
3. Accountability (responsibility) is the suitability of the Primary Entities management and Financial Services Institution (LJK) based on the prudential and soundness principal
4. Independency is the implementation of financial conglomerates which conducted in a professional manner without influence or pressure from other party.
5. Fairness is justice and equal treatment in fulfilling the stakeholder rights resulting from the agreement and legislation.

HSBC Indonesia (which referred as ' Bank HSBC') as the Primary Entities in HSBC Indonesia financial conglomerate prepares the Annual Report on Implementation of Integrated Governance Financial Conglomerates, refer to below regulations :

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 regarding the Implementation of Integrated Financial Conglomerate
2. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 regarding the Implementation of Integrated Financial Conglomerate
3. PBI No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006, amended by PBI No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 regarding The Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank
4. SE BI No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 regarding The Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank

Annual Report on Implementation of Intergrated Governance Financial Conglomerates HSBC Indonesia year 2015 is comprises of:

- Self-Assesment of the Implementation of Integrated Financial Conglomerate
- Structure of Financial Conglomerates

- Struktur Konglomerasi Keuangan
- Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan dan LJK
- Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan
- Kebijakan Transaksi Intra-Grup
- Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank HSBC Indonesia, yang terdiri dari:

- Ownership structure for Financial Conglomerates and Financial Services Institution (LJK)
- Organisation Structure of HSBC Bank as primary entity and LJK (member of conglomerates) in financial conglomerates
- Intra-Group transaction policy
- Report of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which consist of:

Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia

Entitas Utama : PT Bank HSBC Indonesia (HBID)

Entitas Anggota : KCBA HSBC Indonesia (IMO), PT HSBC Securities Indonesia(HCID)

Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Self-assessment of the Implementation of Integrated Governance)

| Peringkat (Rating) | Definisi Peringkat (Rating Definition) |
|--------------------|--|
| 2 | <p>(Baik) Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p> <p><i>(Good) Overall, Financial conglomerates have implemented good Integrated Governance. This is reflected in an adequate fulfillment in the implementation of Integrated Governance. If there are weaknesses in the implementation of Integrated Governance , the general weakness is less significant and can be solved with normal action by the Primary Entities and / or LJK</i></p> |

Analisis (Analysis)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), seluruh entitas anggota Konglomerasi HSBC di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam semua kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan merupakan suatu wujud nyata kesungguhan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kinerja, efisiensi serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Konglomerasi Keuangan ini, maka Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia menyadari masih perlunya penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi guna memastikan kualitas penerapan yang tata kelola yang sama, bersinergi dan terintegrasi antar LJK dalam konglomerasi keuangan. Bank telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada masing-masing LJK. Paska proses integrasi, Bank tetap melakukan proses Konsolidasi internal Bank guna memastikan transisi bisnis dan sumber daya yang ada dapat berjalan dengan baik dan hal ini juga ditunjang oleh pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada konglomerasi keuangan HSBC dengan baik.

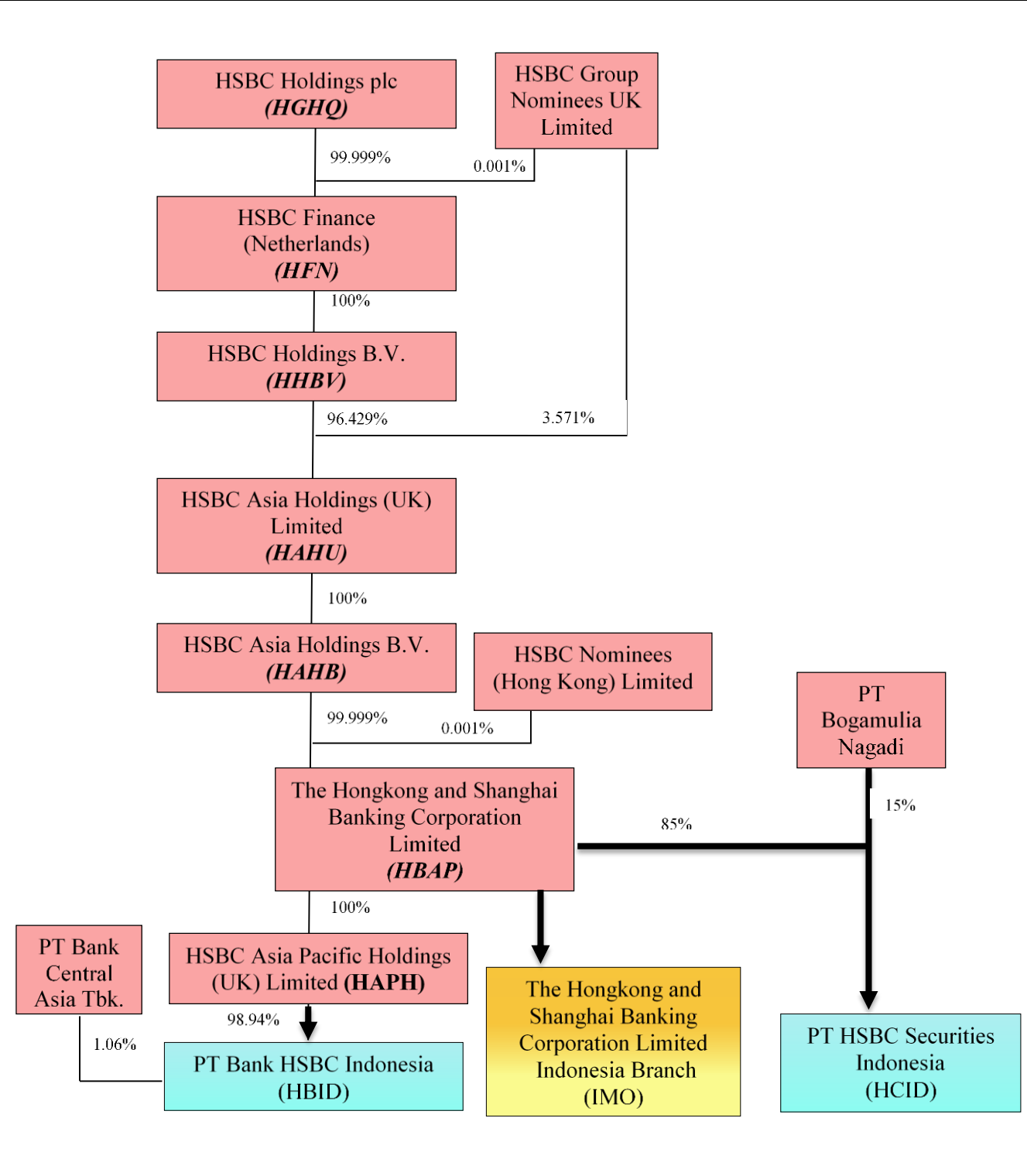
Selain itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari unit-unit yang dibentuk untuk kepentingan Tata Kelola Terintegrasi ini akan terus ditingkatkan lagi agar lebih optimal dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan peraturan dari pihak regulator terkait mengenai pelaksanaan Tata Kelola perusahaan.

Based on the results of self-assessment, all member entities of HSBC Financial conglomerates in Indonesia have implemented the principles of good corporate governance in all its business activities at all levels of the organization and it is a realisation of the commitment to comply with the prevailing laws and regulations to improve performance, efficiency as well as services to stakeholders. With the enactment of Financial Conglomerates regulation, Bank has improved and enhanced Integrated Governance Policy as a reference of integrated governance implementation referring to prevails regulation. Post Integration process, Bank is continuing to perform internal consolidation for ensuring business and its resources transition process is performed adequately. It is supported also by adequate Integrated governance implementation. In addition, the duties and responsibilities of the units which are set up for the benefit of Integrated Governance will be enhanced further to be optimized according to the Integrated Governance Guidelines and other relevant regulations related to corporate governance practices.

| Struktur Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia | HSBC Indonesia Financial Conglomerates Structure |
|--|---|
| <p>Struktur Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia Tahun 2017 terdiri dari:</p> <p><i>HSBC Indonesia Financial Fonglomerates Structure comprises of:</i></p> <p>Entitas Utama/Primary Entity : PT Bank HSBC Indonesia (HBID)</p> <p>Anggota (LJK)/Members : KCBA HSBC Indonesia (IMO) & PT HSBC Sekuritas Indonesia (HCID)</p> | |

Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan HSBC Indonesia

Shareholding Structure of HSBC Indonesia Financial Conglomerates

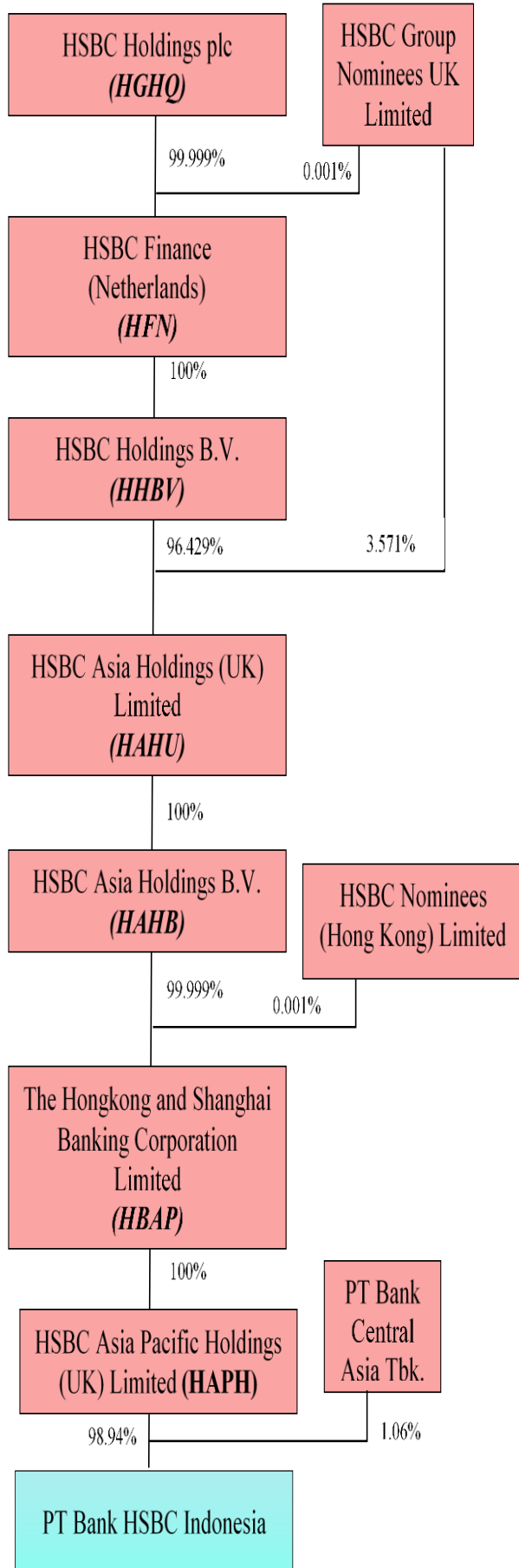


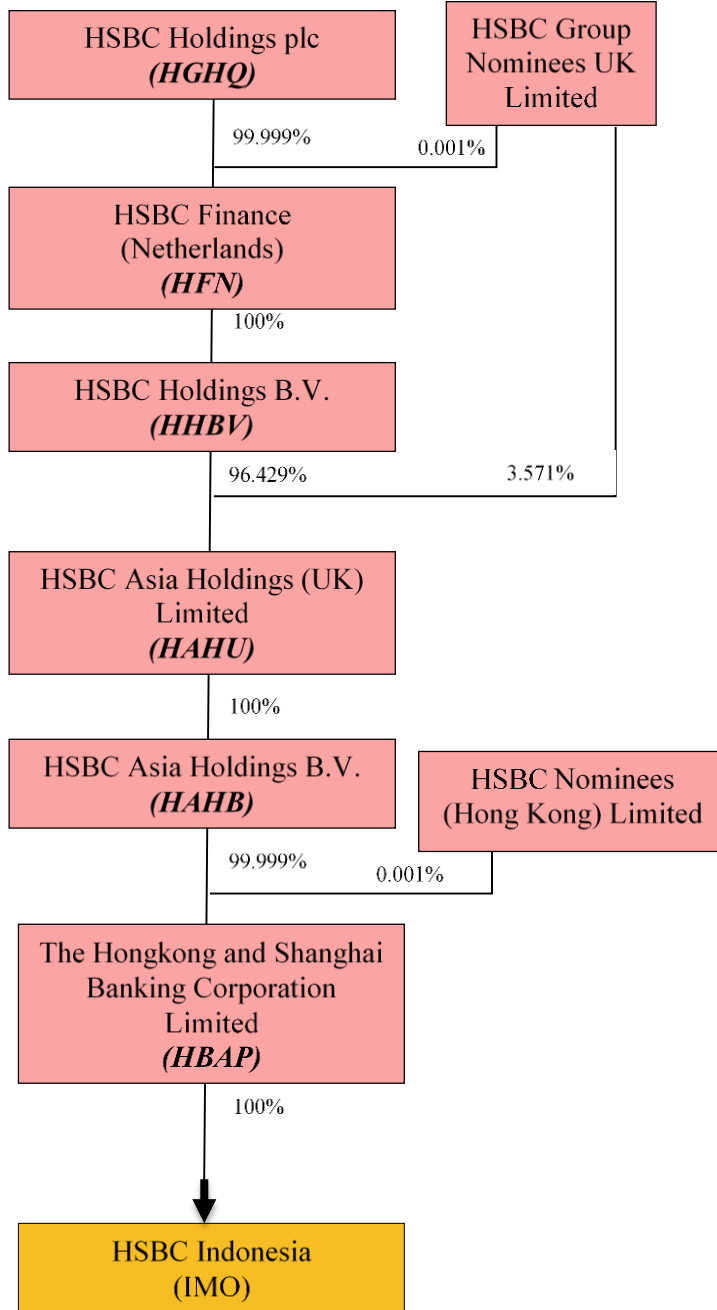
Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan pihak-pihak yang Menjadi Pemegang Saham pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan

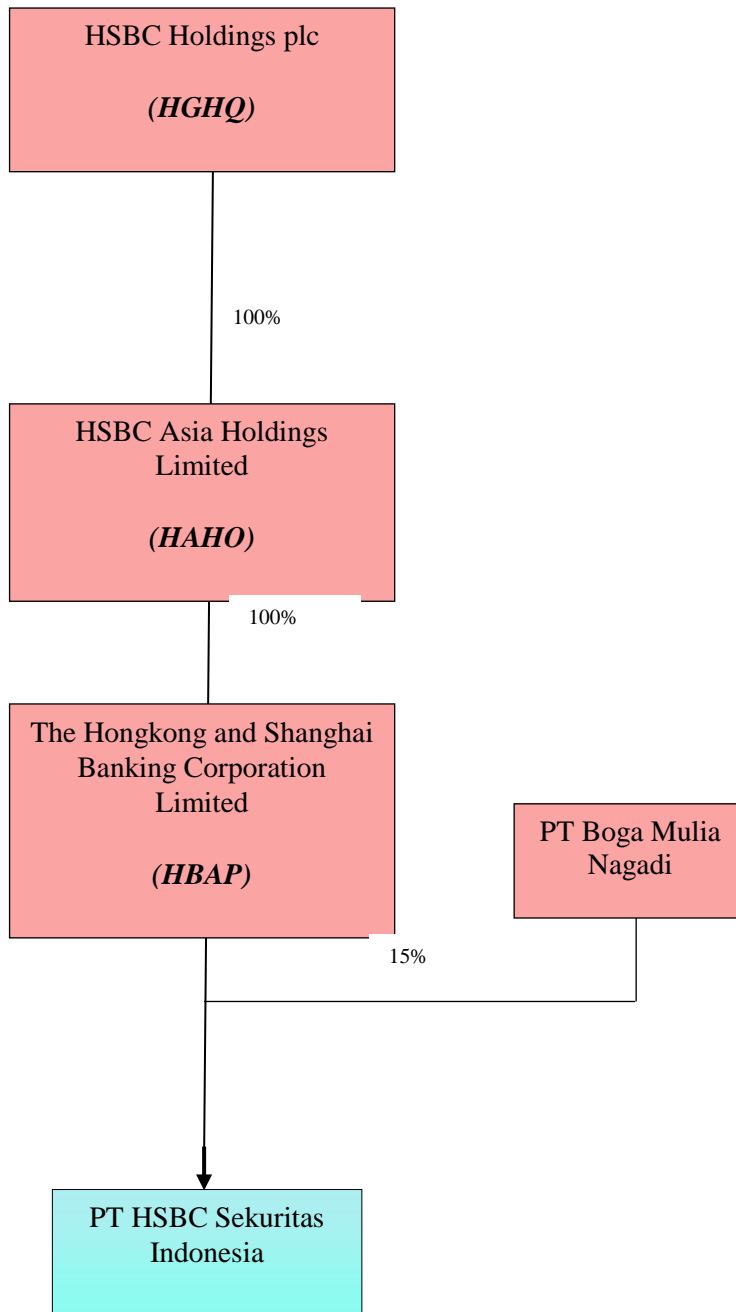
Shareholding Structure of the Financial conglomerate including parties Become Shareholders at member (LJK) of the Financial Conglomerates

PT BANK HSBC INDONESIA (HBID)
 PT Bank HSBC Indonesia, sebagai perusahaan berbadan hukum lokal mempunyai struktur pemegang saham seperti digambarkan pada diagram berikut ini.

PT BANK HSBC INDONESIA (HBID)
 PT Bank HSBC Indonesia as local incorporation entity has share holder structure as described below:







STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK HSBC INDONESIA SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

PT BANK HSBC INDONESIA (HBID)

Proses Integrasi antara Bank HSBC Indonesia dengan Bank Ekonomi Rakyat telah berjalan dengan lancar dan secara resmi menggunakan nama PT Bank HSBC Indonesia sejak 17 April 2017. Adapun susunan kepengurusan pada PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

MANAGEMENT STRUCTURE OF PT BANK HSBC INDONESIA AS PRIMARY ENTITY AND EACH MEMBER IN FINANCIAL CONGLOMERATES

PT BANK HSBC INDONESIA (HBID)

Integration process of HSBC Indonesia (IMO) and Bank Ekonomi Rakyat has successfully performed on 17 April 2017. Board of Commissioner and Board of Management of PT Bank HSBC Indonesia (HBID) are as follow:

| Dewan Komisaris | |
|---|--|
| Jabatan | Nama |
| Presiden Komisaris | Matthew Kneeland Lobner *) |
| Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen | Hanny Wurangian |
| Komisaris Independen | Hariawan Pribadi |
| Komisaris | Mark Thomas McKeown |
| Komisaris Independen | Umar Juoro |
| Komisaris | Antony Colin Turner |
| *) menunggu persetujuan dari Regulator | |
| Dewan Direksi | |
| Jabatan | Nama |
| Presiden Direktur | Sumit Dutta |
| Direktur | Hanna Tantani |
| Direktur | Catherine Hadiman Sugianto |
| Direktur | John Peter Watt Rosie |
| Direktur | Blake Digney Philip Hellam |
| Direktur | Tripudjo Putranto |
| Direktur | Caecilia Pudji Widyarti |
| Direktur | Stephen Whilton Angell *) |
| Direktur Kepatuhan | Yessika Effendi |
| *) menunggu persetujuan dari Regulator | |
| HSBC INDONESIA (IMO) | HSBC INDONESIA (IMO) |
| Pengurus Bank | |
| Jabatan | Nama |
| Management of HSBC Indonesia Branch | Caramia Whardana |
| <p>Status HSBC Indonesia sebagai Kantor Cabang Asing (KCBA), maka untuk penamaan posisi Dewan Direksi dikenal dengan "Pengurus Bank", hal ini sedikit berbeda dengan penamaan pada anggota konglomerasi (LJK) yang lainnya. Hal ini juga berbeda untuk fungsi dan tugas Dewan Komisaris, dimana HSBC Indonesia merupakan kantor cabang dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Kantor Pusat) sehingga Country Manager & Chief Executive HSBC Indonesia mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Head of International Department Asia Pacific dan Head of Strategy & Planning Asia Pacific yaitu Matthew Kneeland Lobner</p> | <p>Status HSBC Indonesia as a Foreign Branch Office then to the naming of the position of the Board known as the " Pengurus Bank" , it is slightly different from the naming of the other members of the conglomerate (LJK) . It is also different for the functions and duties of the Board of Commissioners , where HSBC Indonesia is a branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Headquarters) hence as Country Manager & Chief Executive of HSBC Indonesia accountable execution of his duty to the Head of the International Department of Asia Pacific and Head of Strategy & Planning Asia Pacific , namely Jayant Rikhye</p> |

Dewan Komisaris

| Jabatan | Nama |
|-----------|----------|
| Komisaris | Suliasan |

Dewan Direksi

| Jabatan | Nama |
|-------------------|--------------------------|
| Presiden Direktur | Bartolomeus Hari Mantoro |
| Direktur | Ari Kartiko Wibowo |

PENJELASAN KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup
Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- 1) Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
- 2) Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.

INTRA GROUP TRANSACTION POLICY

The relationship of ownership and / or control in various sectors of financial services will affect the business continuity of financial institutions caused by risks exposure arising directly or indirectly from the subsidiaries/affiliates business activities as a member of financial conglomerates. Intra - group transaction risk is the risk of reliance/dependency an entity, either directly or indirectly, to other entities in a financial conglomerate in order to fulfill its written contractual obligation or unwritten agreements that followed the transfer of funds and / or not followed by transfer of funds

Objectives of Intra - Group Transactions Risk Management

The main objective of intra - group transactions risk management are:

- Organize and supervise intra - group transaction in financial conglomerates based on the prudential principle
- Ensure that risk management process is able to minimize the likelihood of negative impacts caused by the dependence among members of financial conglomerates (LJK), either directly or indirectly

Intra - Group Transaction Type

The Intra - group transactions risk , among others, can arise from :

1. Cross ownership between LJK (members) in financial conglomerates
2. Centralized of short-term liquidity

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3) Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan. 4) Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan <i>off-balance sheet</i> seperti jaminan dan komitmen. 5) Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan. 6) Transfer risiko melalui reasuransi. 7) Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan. | <p>management</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Guarantees , loans , and commitments given or obtained from one another of members in the financial conglomerates 4. Exposures to the controlling shareholder , including the loan exposure and off - balance sheet items such as guarantees and commitments 5. Purchase or sale of the asset to another LJK (member) within a financial conglomerates 6. Transfer the risk through reinsurance 7. Transaction to transfer third-party risk exposure among LJK within financial conglomerates |
| <p>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p><i>Risk appetite dan risk tolerance</i> Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dijelaskan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis. 2. Toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil. 3. Tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan. <p>Kebijakan dan Prosedur Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup. 2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas <i>arm's length</i> (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup. 3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang | <p>Policies, Procedures, and Limit Set Up of Intra - Group Transactions Risk</p> <p>Policies, procedures, and Limit Set up of Intra - Group Transactions Risk is referred to the policies, procedures and limits as stated in Integrated Risk Management Policy</p> <p><i>Risk appetite and risk tolerance</i> The risk level of intra- group transactions that will be taken (<i>risk appetite</i>) and risk tolerance (<i>risk tolerance</i>) are described as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The level of risk of intra - group transactions that will be taken (<i>risk appetite</i>) are willing to take risks in order to achieve objectives in an integrated manner. Risks to be taken is reflected in the strategy and business goals 2. The risk tolerance (<i>risk tolerance</i>) is the maximum level of risk that is willing to take 3. The level of risk to be taken (<i>risk appetite</i>) and risk tolerance (<i>risk tolerance</i>) must be in line with the business strategy , risk profile and capital plan in financial conglomerates <p>Policies and Procedures Things to consider in the policies and procedures relating to the intra - group transactions risk, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Conglomerates Policy must comply with prevailing regulation on intra - group transactions 2. Financial Conglomerates Policy have to ensure the fulfillment of arm's length principle (the fairness of the transaction) related to intra - group transactions 3. Intra - group transactions risk |

| | |
|--|--|
| <p>yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.</p> <p>3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.</p> <p>3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>).</p> <p>Limit Risiko Transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Group yang telah ditetapkan yaitu berupa Global Standards Manual (GSM) dan Functional Instruction Manual (FIM) yang digunakan sebagai kebijakan dan prosedur yang wajib dilaksanakan guna memitigasi risiko.</p> | <p>Management Procedures shall at least comprises of :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Accountability and delegation of authority levels in the implementation of intra - group transactions risk managements • Regular review on Procedures • Adequate documentation, completeness and traceable (audit trail) on Procedures/Policy <p>Limit Risk Intra - Group Transactions Financial Conglomerates should ensure that the determination of the intra – group transaction limit has been in line with prevailing regulation as well as prevailing group policies and procedures that has been defined in the form of Global Standards Manual (GSM) and Functional Instruction Manual (FIM) which are used as a reference of policies and procedures, in order to mitigate risk .</p> |
| <p>Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup</p> <p>Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (<i>risk factors</i>) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.</p> <p>Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan. 2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Identifikasi informasi lainnya. <p>Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup</p> <p>Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.</p> <p>Peringkat risiko: Dilihat dari tingkat risiko inheren</p> | <p>The Adequacy of Identification Process, Measurement, Monitoring and Risk Control as well as Risk Management Information System of Intra - Group Transactions</p> <p>In the implementation of intra – group transaction risk management, primary entities is obliged to conduct the identification, measurement, monitoring, and risk controlling to all the risk factors that are significant in an integrated manner, and supported by adequate risk management information system</p> <p>Identification of Intra - Group Transactions Risk Identification of intra - group transactions risk is carried out through:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identify the composition of intra - group transactions within the financial conglomerates 2. Identification of fairness and documentation of transaction 3. Identify other information. <p>Risk Measurement of Intra - Group Transactions</p> <p>Measurement of intra - group transaction risks aims to rank the level of intra - group transactions risk financial conglomerates. In addition, the primary entities is obliged to prepare an integrated intra - group transactions risk profile with members of the financial conglomerates Risk Rating: Defined from the level of inherent risk</p> |

| | |
|--|---|
| <p>dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kesehatan bank berada pada peringkat 1. Kondisi Bank secara umum sehat, dengan risiko transaksi intra grup minimum.</p> | <p>and quality level of risk management implementation, we concluded that Bank soundness is ranked 1. Generally the Bank condition is good (sound) with minimum intra-group transactions risk</p> |
|--|---|

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank HSBC Indonesia

| | |
|---|--|
| <p>Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank HSBC Indonesia selama 2017 telah kami laporkan dan paparkan di dalam Laporan Tahunan Bank. Berikut kami lampirkan Laporan Tahunan Bank 2017 yang berisi Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank HSBC Indonesia</p> <p>Silahkan klik tautan dibawah ini: http://www.about.hsbc.co.id/id-id/hsbc-in-indonesia/financial-and-regulatory-reports</p> | <p>Report of 2017 Good Corporate Governance Implementation has reported and published, it is incorporated in Bank's Annual Report. For detail please follow link below.</p> <p>http://www.about.hsbc.co.id/id-id/hsbc-in-indonesia/financial-and-regulatory-reports</p> |
|---|--|

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

**SELF ASSESSMENT REPORT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION**

Nama Bank : PT Bank HSBC Indonesia (HBID)
Name of Bank :

Posisi : 31 December 2017
Position :

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PERIHAL PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM**

Nama Bank : PT Bank HSBC Indonesia (HBID)
Posisi : 31 Desember 2017

| Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG | | |
|--|------------------|--|
| | Peringkat | Definisi Peringkat |
| Individual | 2 | <p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p> <p>This rating indicates that Bank Management has, in general, implemented Good Corporate Governance well. This was reflected in the proper application of Good Corporate Governance principles. In the event of flawed implementation of Good Corporate Governance principles, the weaknesses are generally less significant and overcome by common measures taken by Bank management.</p> |
| Konsolidasi | | - |
| Analisa | | |
| <p>1. Secara umum HBID telah melaksanakan Tata Kelola secara baik dan memadai meskipun masih terdapat perbaikan – perbaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan diterapkannya prinsip TARIF. Perbaikan tersebut senantiasa ditindaklanjuti dan diperbaiki secara efektif dan efisien oleh manajemen.</p> <p>2. Kesimpulan dari pelaksanaan Tata Kelola di HBID, tercermin dari <i>self assessment</i> HBID terhadap <i>governance structure, governance process</i> dan <i>governance outcome</i> yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Structure Governance</i> di HBID telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK dan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha di HBID sebagai Bank lokal bertaraf internasional. Saat ini anggota Dewan Direksi HBID berjumlah 8 anggota dan kedepannya akan menambah 1 (satu) anggota Direksi lagi, yakni Direktur Manajemen Risiko, yang telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 September 2017 dan sedang dalam proses menunggu persetujuan dari OJK. <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris per akhir Desember 2017 adalah 3 (tiga) orang. HBID telah mengangkat 1</p> | | |

(satu) orang kandidat Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Februari 2017. Kemudian pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 September 2017, HBID mengangkat masing-masing 1 (satu) orang kandidat Presiden Komisaris dan 1 (satu) orang kandidat Komisaris Independen sehingga kedepannya setelah disetujui oleh OJK maka jumlah anggota Dewan Komisaris HBID akan berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi 50% Komisaris dan 50% Komisaris Independen.

HBID melaksanakan setiap kegiatan usahanya berdasarkan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik dan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Berdasarkan hasil self assessment terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola HBID pada semester II tahun 2017, dapat disampaikan bahwa :

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha HBID dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi periode Desember 2017 adalah 8 (delapan) orang. Saat ini anggota Dewan Direksi HBID berjumlah 8 anggota dan kedepannya akan menambah 1 (satu) anggota Direksi lagi, yakni Direktur Manajemen Risiko, yang telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 September 2017 dan sedang dalam proses menunggu persetujuan dari OJK sehingga kedepannya setelah disetujui oleh OJK maka jumlah anggota Direksi HBID menjadi 9 (sembilan) orang.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan telah memenuhi prinsip – prinsip Tata Kelola.
- Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha di HBID.
- Setiap transaksi benturan kepentingan di HBID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan kepatuhan bank telah dilaksanakan bank dengan merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Fungsi Audit Intern HBID telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan memenuhi pedoman intern serta sesuai standar minimum.
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan Tata Kelola.
- Secara umum fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern HBID telah dilakukan secara efektif.
- Manajemen aktif memantau kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen untuk memelihara kondisi internal bank yang sehat.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*).
- Bank telah mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK dan pengambilan keputusan dilakukan sangat independen.
- Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
- Informasi keuangan dan non-keuangan Bank sangat transparan kepada publik melalui *homepage* dan media yang sangat mudah diakses sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dan otoritas moneter lainnya.

- Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun dengan memperhatikan sebagian besar faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
- Bank melaksanakan Tata Kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi secara efektif dan terorganisir secara baik.

- *Governance Process* di HBID telah dilaksanakan secara baik. Terdapat dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur sesuai dengan kompleksitas usaha HBID untuk pelaksanaan atas *governance process*. Namun demikian, sampai dengan posisi Desember 2017 masih terdapat 1 (satu) orang kandidat Direktur dalam proses menunggu persetujuan Penilaian dan Kepatutan. HBID juga masih menunggu persetujuan hasil Uji Penilaian dan Kepatutan untuk 1 (satu) orang kandidat Presiden Komisaris, 1 (satu) orang kandidat Komisaris dan 1 (satu) orang kandidat Komisaris Independen.

- Pasca integrasi, terdapat faktor internal and eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan kredit Bank. Pada semester II/2017, realisasi kredit yang diberikan lebih rendah sebesar 14,95% dari jumlah target yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit, penyelesaian kredit korporasi bermasalah tertentu selama tahun berjalan serta dipeliharanya *risk appetite* yang *prudent* atas risiko kredit oleh Bank. Meskipun realisasi kredit yang diberikan berada di bawah target, Bank senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana dan penyediaan dana. Sebagai hasilnya, LDR berada di tingkat 106,55%, sedikit di bawah target (4,54%) namun pencapaian NIM masih melampaui target yang ditentukan. Hal ini sebagai dampak positif dari penurunan pendanaan mahal.

Dengan integrasi HBID pertanggal 17 April 2017, HBID fokus melakukan konsolidasi dan harmonisasi internal menjadi salah satu tantangan Bank dalam melakukan ekspansi kredit. Pada triwulan II/2017, realisasi kredit yang diberikan lebih rendah sebesar 14,95% dari jumlah target yang dicantumkan dalam RBB 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit, penyelesaian kredit korporasi bermasalah tertentu selama tahun berjalan serta dipeliharanya *risk appetite* yang *prudent* atas risiko kredit oleh Bank. Meskipun realisasi kredit yang diberikan berada di bawah target, Bank senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana dan penyediaan dana. Sebagai hasilnya, LDR berada di tingkat 106,55%, sedikit di bawah target (4,54%) namun pencapaian NIM masih melampaui target yang ditentukan. Hal ini sebagai dampak positif dari penurunan pendanaan mahal.

- *Governance Outcome* di HBID, meskipun terdapat dampak pengalihan konsentrasi dari Integrasi dimana Bank fokus pada konsolidasi internal. Bank terus melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk menjaga kinerja keuangan Bank sehingga target hasil keuangan dapat dicapai walaupun pertumbuhan kredit pada semester II/2017 mengalami deviasi dari target RBB. Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan HBID pada semester II tahun 2017, penjelasan terkait deviasi antara realisasi dan target RBB adalah sebagai berikut :

Modal

Rasio KPMM 31 Desember 2017 mencapai 22,42%, pencapaian tersebut lebih tinggi dari target sebesar 4,06%, yang terutama dikontribusi oleh realisasi ATMR risiko kredit yang lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini sejalan dengan pencapaian kredit yang diberikan.

Kualitas Aset Produktif

Realisasi rasio aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif adalah sebesar 1,54% dimana angka ini berada diatas estimasi yang ditargetkan. Realisasi kredit yang diberikan pada Semester II – 2017 mencapai Rp 60.662 milyar atau lebih rendah sebesar 14,95% dari jumlah yang ditargetkan di dalam RBB. Rasio NPL-gross berada di tingkat 4,26% dimana lebih tinggi 0,46% dibandingkan dengan target. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tercapainya target kredit yang diberikan. Apabila ditinjau dari saldo kredit bermasalah (NPL), saldo aktual NPL adalah Rp. 2.586 milyar dimana lebih rendah dibandingkan proyeksi sebesar Rp. 2.710 milyar. Saldo kredit bermasalah yang lebih rendah dari target ini merupakan hasil dari usaha Bank dalam memperbaiki kualitas portofolio kredit

sepanjang semester kedua tahun 2017. Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif per 31 Desember 2017 sebesar 2,80% berada pada kisaran yang ditargetkan dalam RBB sebesar 2,73% atau hanya sedikit lebih tinggi sebesar 0,07%. Hal ini juga sebagai dampak dari tidak tercapainya target kredit yang diberikan.

Rentabilitas

Bank membukukan laba sebelum pajak pada semester kedua 2017 sebesar Rp 1.561 milyar yang lebih tinggi dari target sebesar Rp. 528 milyar (51,10%). Pencapaian ini terutama dikontribusi oleh pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi sebesar Rp 80 milyar, pendapatan komisi bersih sebesar Rp. 347 milyar, lebih rendahnya beban bersih CKPN yang dibentuk sebesar Rp 244 milyar sebagai hasil dari usaha Bank dalam menjaga kualitas portofolio kredit, dan lebih rendahnya beban operasional sebesar Rp 498 milyar dari target dimana pencapaian ini dapat mengkompensasi lebih rendahnya pencapaian pendapatan operasional lainnya.

Rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) mencapai 82,31% lebih rendah dari target sebesar 89,00%. Pencapaian rasio BOPO yang lebih rendah ini terutama dikontribusi oleh lebih rendahnya beban operasional dari target di dalam RBB. Selain itu, lebih rendahnya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta beban bunga juga turut memberi kontribusi positif dalam pencapaian rasio BOPO tersebut.

Return on Equity (ROE) sebesar 12,38% dan *Return on Asset (ROA)* sebesar 1,84% per 31 Desember 2017 lebih tinggi masing-masing sebesar 6,15% dan 0,65% dibandingkan dengan yang diproyeksikan dalam RBB. Pencapaian ini merupakan dampak positif dari laba yang lebih tinggi dibandingkan target.

Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR) per 31 Desember 2017 mencapai 106,55%, lebih rendah dari target sebesar 4,54%. Hal ini terutama disebabkan oleh dana pihak ketiga yang lebih rendah sebesar Rp 7.269 milyar (11,32%) dari target. Hal ini dipengaruhi oleh upaya Bank dalam mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan dana dan penyediaan dana sehingga peningkatan dana dilakukan sejalan dengan pertumbuhan kredit. Lebih lanjut, lebih rendahnya DPK dari target didominasi oleh dana dengan suku bunga mahal sehingga hal ini memberikan dampak positif pada pendapatan bunga bersih dan NIM yang lebih baik dibandingkan target. Hal ini sesuai dengan strategi Bank dalam meningkatkan efisiensi pendanaan.

Aspek *governance outcome* secara umum terlaksana secara baik dan memadai terutama dalam aspek kualitatif meskipun senantiasa dilakukan perbaikan dan review/penilaian secara berkesinambungan. Pelaksanaan GCG sebagai tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko yang berkesinambungan dan pelaksanaan prinsip kepatuhan yang konsisten telah berlaku di HBID.

1. In general, HBID has implemented GCG well and properly regardless of few case-by-case and insignificant deficiencies. The deficiencies were always overcome and HBID management had effectively and efficiently made improvement.
2. The conclusion of HBID's GCG implementation is reflected in HBID's self assessment of the governance structure, governance process, and governance outcome, namely:
 - HBID Governance Structure was imposed in compliance with OJK regulations and commensurate with HBID's business scale, characteristics, and complexity, as a local Bank of international level. There are currently eight (8) members of Board of Directors and HBID will add one (1) more, Risk Management Director, who was appointed at Extraordinary Shareholders' Meeting on 18 September 2017. HBID awaits OJK approval.

As at December 2017, there were three (3) members of Board of Commissioners. HBID appointed one (1) designate Commissionaire at Extraordinary Shareholders' Meeting on 21 February 2017. At the next Extraordinary Shareholders' Meeting on 18 September 2017, HBID appointed one (1) candidate President Commisionaire and one (1) candidate Independent Commissioner. Thus, upon OJK approval, HBID Board of Commissioners will consist of six (6) members, the composition of which is 50% Commissioners and 50% Independent Commissioners.

In any of its business activities, HBID had applied five (5) fundamental GCG principles and eleven (11) assessment factors of GCG implementation in any of its business activities. The results of self assessment of the adequacy of HBID's governance structure and infrastructure throughout 2H/2017 are as follows:

- The number, composition, integrity and competencies of Directors were commensurate with Bank business scale and complexity as well as in compliance with regulations in effect. There were eight (8) directors as at December 2017 and HBID will add one (1) more, Risk Management Director, appointed at Extraordinary Shareholders' Meeting on 18 September 2017. HBID awaits OJK approval on this one. Thereupon, HBID will have nine (9) Directors.
- All Directors were capable to act and to take decisions independently and in observance of GCG principles.
- The composition and competencies of the Committee members were commensurate with HBID business scale and complexity.
- Any conflict of interest was handled in compliance with regulations in effect.
- HBID implemented bank compliance in compliance with BI and OJK regulations, and statutory in effect.
- In implementing Bank Internal Audit function, HBID applied GCG principles. The function was performed effectively under internal guidelines, and up to the minimum standards.
- The audit by Public Accountant was effectively done according to the minimum requirements specified in GCG Requirements.
- In general, HBID risk management and internal control was performed effectively.
- Management actively monitored the policies, procedures, limit setting, and MIS to maintain its sound internal condition.
- Lending to related party(-ies) and large exposures were granted.
- Bank had applied GCG principles. There had been neither breach nor excess of Legal Lending Limit. Moreover, the decisions were taken very independently.
- HBID transparently disclosed financial and non-financial condition, Good Corporate Governance Implementation Report, and internal report.
- The Bank financial and non financial information was very transparently disclosed to public via the easily-accessed homepage and media in compliance with the regulations governed by Bank Indonesia and any other monetary authorities.
- Bank Business Plan was drawn up having observed mostly external and internal factors as well as prudential and sound banking principles.
- HBID performed, in an effective and well-organised way, integrated Governance and integrated risk

management.

- HBID governance process was well imposed supported by adequate structure and infrastructure which was commensurate with HBID business complexity therefor. In fact, as at December 2017, HBID awaited approval to have Fit and Proper test on one (1) designate Director and approval on Fit and Proper test results on: one (1) designate President Commissioners, one (1) designate Commissioner, and one (1) designate Independent Commissioner.
- There have been internal and external post-integration factors affecting the Bank's credit growth. As at 2H/2017, the realised advances, 14.95%, was below the target specified in Bank Business Plan 2017 (the "target"). This was triggered by the declining demand for credit, settlement of particular corporate credit during the current year, and the Bank's maintained prudent risk appetite over credit risks. Despite of being below target, the Bank has kept, at all times, balance between funding and lending to achieve LDR of 106.55%, slightly below target by 4.54%. The actual NIM, however, is above target being the positive impacts from the declining costly funding.

Upon HBID Integration on 17 April 2017, HBID has focused on the consolidation and internal harmonisation, both of which was one of the Bank's constraints in credit expansion. The realised advances as at 2Q/2017, 14.95%, was below target. The reasons were declining demand for credit, settlement of particular corporate credit during the current year, and the Bank's maintained prudent risk appetite over credit risks. Despite of being below target, the Bank has kept, at all times, balance between funding and lending to achieve LDR of 106.55%, slightly below the targeted 4.54%. The actual NIM, however, is above target being the positive impacts from the declining costly funding. This is the positive impacts from the declining costly funding.

HBID Governance Outcome. Despite some impacts from the shifted concentration from Integration to internal consolidation, HBID had maintained at all times its financial performance, hence financial target is achieved although credit growth in 2H/2017 has deviated from Business Plan target. The results of self assessment 2H/2017 that it had undertaken are as follows:

Capital

Minimum CAR as at 31 December 2017 was 22.42%, far exceeding regulatory minimum ratio of 4.06%, chiefly driven by the actual below target credit risk RWA. This is in line with the realised advances.

Quality of Earning Assets

The realised ratio of Low Quality Earning and Non-Earning Assets to the total of Earning and Non-Earning Assets, 1.54%, was above the target. The realised Advances throughout 2H/2017 totaled IDR 60,662 billion or 14.95% below target. Gross NPL was 4.26% or 0.46% above target. These had occurred because of the unachieved Advances target. In terms of NPL, the actual NPL balance, IDR 2,586 billion, was below the targeted IDR 2,710 billion, as result of Bank's revenues in improving credit portfolio quality throughout 2H/2017. The ratio of Low Quality Earning Assets to total Earning Assets per 31 December 2017, 2.80%, was within range of the targeted 2.73%, or slightly above target by 0.07%. This was also the impacts from the unachieved Advances target.

Profitability

The Bank booked Profit Before Tax as at 2H/2017, IDR 1,561 billion, was above target by IDR 528 billion (or 51.10%). This was driven mainly by Net Interest Income that was Rp 80 billion above target, net commission revenue of IDR 347 billion, and below target Net Provision for Impaired Loans (IDR 244 billion), all resulted from the Bank's endeavours in preserving credit portfolio quality and lower Operating Expenses which was IDR 498 billion below target. These all could compensate lower miscellaneous Operating Revenues.

BOPO ratio, 82.31%, was below the targeted 89.00%, mainly because the below target Operating Expenses. The below target Provision for Impaired Loans and Interest Expenses had also promoted lower BOPO.

Return on Equity (ROE) and *Return on Asset (ROA)* per 31 December 2017 were 12,38% and 1,84% respectively, or above target by 6.15% and 0.65%. These serve the positive impact from the above-target-profit.

Liquidity

Loan to Deposit Ratio (LDR) as at 31 December 2017 reached 106.55% or 4.54% below target. The main drive was Third Parties' Funds that were below target by IDR 7,269 billion (or 11.32%). This was affected by the Bank's endeavours to keep funding and lending balance so that the increased funding commensurate with credit growth. Further, the below target Third Parties' Funds were dominated with Costly Funding giving the positive impacts (above target) on Net Interest Income. This reflects the Bank strategies in improving funding efficiency.

In general, Governance Outcome aspect has been well and properly implemented, mainly in terms of qualitative aspect, despite of remedies and review/assessment from time to time. Good Corporate Governance implementation constitutes the good corporate governance, continuous risk management implementation, and consistently applied compliance principles.